

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemiskinan merupakan permasalahan penting yang dialami oleh negara berkembang, termasuk Indonesia. Kemiskinan berkaitan erat dengan masalah-masalah lain seperti pendidikan, ekonomi, sosial dan budaya. Masalah kemiskinan tidak hanya disebabkan oleh pendapatan yang tidak mencukupi serta kondisi ekonomi yang kekurangan, namun juga dapat disebabkan oleh tingkat kualitas SDM di dalam negara tersebut, seperti banyaknya pengangguran dan ketimpangan antar daerah. Kemiskinan menjadi salah satu potret permasalahan global yang sangat penting dan harus segera dituntaskan oleh pemerintah sebagai pemegang kebijakan maupun pihak-pihak lain yang memiliki peran dalam pengentasan kemiskinan di Indonesia.

Berdasarkan data BPS pada bulan Maret 2018, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan) di Indonesia sebesar 25 juta orang atau 9,82%. Jumlah tersebut mengalami penurunan sebesar 633 ribu orang, dari yang sebelumnya tercatat sebesar 26 juta orang atau 10,12% pada September 2017. Persentase kemiskinan pada Maret 2018 mencapai 9,82%, hal ini pertama kalinya Indonesia mendapatkan tingkat angka kemiskinan satu digit. Penurunan angka kemiskinan tersebut disebabkan adanya peranan komoditi makanan dan bantuan sosial tunai dari pemerintah yang tumbuh

87,6% terhadap garis kemiskinan. Adapun upaya lain yang dapat dilakukan untuk mengatasi kemiskinan yaitu dengan memperluas kesempatan kerja melalui pendekatan pemberdayaan, fasilitas kredit guna mendorong perkembangan serta pertumbuhan UMKM serta meningkatkan infrastruktur.

Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) menjadi sektor yang memiliki peranan penting dalam menumbuhkan perekonomian nasional terutama sebagai sumber pertumbuhan kesempatan kerja serta penanggulangan kemiskinan di Indonesia, karena sebagian besar penduduk memiliki penghasilan dari kegiatan usaha kecil yang masih sederhana maupun sudah modern. Pengembangan usaha kecil menjadi bagian utama dalam setiap rencana pembangunan, namun usaha pengembangan yang dilakukan masih belum memberikan hasil yang maksimal karena pada kenyataannya untuk memajukan UMKM di Indonesia perlu melibatkan semua pihak yang terkait yaitu antara pelaku usaha dan pembuat kebijakan perekonomian. Pada krisis ekonomi tahun 2009, peran UMKM dalam masa krisis tersebut mampu diandalkan melalui penyerapan tenaga kerja. UMKM merupakan pilihan yang tepat karena krisis tersebut menyebabkan nilai ekspor Indonesia menurun hingga berdampak pada konsumsi masyarakat dan optimalisasi produksi dalam negeri.

Berdasarkan data dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa jumlah pelaku usaha mikro kecil dan menengah pada tahun 2018 sebanyak 58,97 juta orang, dengan menyumbang terhadap PDB sebesar 60,34%. Peranan

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) terhadap perekonomian nasional terhitung cukup besar, jumlah tersebut mencapai 99,9% dan penyerapan tenaga kerja mencapai 97%, secara jumlah usaha kecil di Indonesia mencapai 93,4% dan usaha menengah 5,1% serta usaha besar hanya 1%.

UMKM telah memberikan kontribusi serta peranan yang sangat besar bagi pertumbuhan ekonomi di Indonesia, namun keberadaan UMKM masih sering menghadapi beberapa hambatan baik dari segi eksternal maupun internal. Kendala eksternal disebabkan dari beberapa hal, antara lain terbatasnya akses pembiayaan usaha, biaya infrastruktur yang mahal, serta layanan birokrasi yang kurang efisien. Sedangkan yang berkaitan dengan masalah internal yaitu permodalan.

Salah satu program pemerintah sebagai solusi untuk menambah pendapatan para pelaku usaha kecil, yaitu dengan cara pemberian pinjaman melalui PNPM Mandiri. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri ini terdiri dari PNPM Mandiri Perdesaan, PNPM Mandiri perkotaan dan PNPM wilayah khusus serta desa tertinggal. PNPM Mandiri Perdesaan merupakan program pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan perdesaan yang terdiri dari program SPP (simpan pinjam perempuan) dan UEP (usaha ekonomi produktif) dengan memberikan pinjaman dana bergulir kepada pelaku usaha kecil. Pada tahun 2014 Program Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) telah berakhir sehingga untuk melestarikan dan mengembangkan aset masyarakat desa dari program PNPM Mandiri dibentuklah UPK (unit pengelola kegiatan)

serta BKAD (badan kerjasama antar desa). Sasaran dari program ini adalah masyarakat yang memiliki usaha namun masih kurang mampu dalam hal permodalan. Pinjaman ini tentunya akan mengarah pada pelaku usaha mikro yang membutuhkan tambahan modal untuk mengembangkan usahanya. Unit Pengelola Kegiatan (UPK) merupakan mandat pelaksana dari yang selama ini dinilai berhasil. Beberapa keberhasilan UPK adalah upaya pemberian modal atau dana bergulir terhadap UMKM guna membuka lapangan kerja dan mampu menambah pendapatan bagi kelompok rakyat miskin, efisiensi dan efektivitas kegiatan.

UPK Satu Hati Kecamatan Playen merupakan salah satu PPM di Kabupaten Gunung Kidul yang telah melaksanakan program SPP sejak tahun 2006 dan telah tersebar pada 13 desa di Kecamatan Playen. program SPP tersebut bertujuan untuk memudahkan akses pendanaan usaha mikro, memenuhi kebutuhan pendanaan sosial dasar, memperkuat kelembagaan kaum perempuan, serta mendorong pengurangan Rumah Tangga Miskin (RTM) dan mampu menciptakan lapangan kerja. Pada November 2018, tercatat bahwa UPK Satu Hati mampu melayani kelompok SPP sejumlah 300 kelompok dengan total pemanfaat 2.200 orang, adapun tingkat kemacetan yang terjadi hanya berjumlah 0,3%. Dalam penyediaan modal, UPK Satu Hati Kecamatan Playen mampu memberikan fasilitas bunga yang sangat ringan per tahun yaitu sebesar 18%, UPK juga memberikan potongan pembayaran terhadap nasabah yang tertib sebesar 20% dari bunga yang ditetapkan.

Tabel 1.1.

Laporan Perkembangan Pinjaman Tahun 2017 dan 2018

No	Nama Desa	Jumlah Kelompok		Jumlah Penerima (orang)		Nilai Pinjaman (juta rupiah)	
		2017	2018	2017	2018	2017	2018
1	Banyusoco	24	27	139	156	866	1.056
2	Plembutan	21	24	162	178	1.040,1	1.089,5
3	Bleberan	33	33	221	218	1.377	1.316
4	Getas	26	23	152	140	797,5	718
5	Dengok	13	13	127	131	817	900,5
6	Ngunut	7	7	60	54	315,5	286,5
7	Playen	20	19	179	164	1.198	1.097
8	Ngawu	29	31	225	219	1.749,5	1.779,5
9	Bandung	19	22	166	150	893	872,5
10	Logandeng	26	24	298	186	1.605,1	1.748
11	Gading	45	39	282	243	1.754	1.712,5
12	Banaran	22	25	177	196	1.073	1.243,5
13	Ngleri	11	7	91	51	551	289
Jumlah		296	293	2279	2086	12.458,1	14.108,5

Sumber: Data UPK Satu Hati Playen tahun 2019

Berdasarkan tabel 1.1 pada tahun 2017 tercatat jumlah kelompok sebesar 296 dengan total pemanfaat sebesar 2279, alokasi dana yang disalurkan sebesar Rp 12.458.100. Sedangkan pada tahun 2018 mengalami penurunan jumlah kelompok menjadi 293 kelompok dengan total pemanfaat 2086 orang, namun terjadi peningkatan jumlah dana yang disalurkan menjadi Rp 14.108.500.000.

Mengingat Kabupaten Gunung Kidul merupakan salah satu kabupaten miskin di DIY, maka harapan pemerintah dengan adanya bantuan pinjaman dana bergulir tersebut mampu mengembangkan UMKM di Kecamatan Playen sehingga dapat membuka lapangan kerja lebih luas, meningkatkan pendapatan rumah tangga, taraf hidup yang lebih baik, serta menurunkan angka kemiskinan.

Dalam penelitian ini, peneliti hanya akan mengamati tentang kegiatan yang berkaitan dengan pinjaman dana bergulir oleh UPK Satu Hati terhadap kinerja UMKM di kecamatan Playen. PNPM sebagai salah satu program penanggulangan kemiskinan maupun meningkatkan pendapatan UMKM di pedesaan, keberhasilannya dapat diukur dengan melihat sejauh mana tujuan dan manfaat tersebut dapat dicapai dan dinikmati oleh para pelaku usaha sebagai sasaran program.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk meneliti tentang **“Analisis Pengaruh Pinjaman Dana Bergulir Terhadap Kinerja UMKM di Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul”**.

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah penelitian ini ialah:

1. Adakah pengaruh pinjaman dana bergulir terhadap kinerja UMKM di Kecamatan Playen berdasarkan nilai penjualan dan keuntungan?
2. Adakah perbedaan rata-rata nilai penjualan sebelum dan sesudah mendapatkan pinjaman dana bergulir?
3. Adakah perbedaan rata-rata keuntungan sebelum dan sesudah mendapatkan pinjaman dana bergulir?

B. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini, ialah:

1. Untuk menganalisis pengaruh pinjaman dana bergulir terhadap kinerja UMKM di Kecamatan Playen yang berdasarkan nilai penjualan dan keuntungan.
2. Untuk mengetahui perbedaan nilai penjualan sebelum dan sesudah mendapatkan pinjaman dana bergulir.

3. Untuk mengetahui perbedaan keuntungan sebelum dan sesudah mendapatkan pinjaman dana bergulir.

C. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Bagi mahasiswa dapat memperoleh pengetahuan tentang dampak dana bergulir terhadap kinerja UMKM, selain itu juga dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan di bidang ekonomi. Khususnya mengenai dampak dana bergulir.
2. Manfaat Praktis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang berarti kepada pemerintah untuk selanjutnya dapat dipertimbangkan dalam penyusunan kebijakan sehingga kebijakan tersebut dapat dilaksanakan secara berkelanjutan
 - b. Memberikan informasi bagi pembaca dan penulis lain sebagai inspirasi untuk dikembangkan ke topik yang lain.